JURNAL PENYULUHAN

Jurnal Penyuluhan Vol. 16 (02) 2020 | 224-239
https://doi.org/10.25015/16202030160

Perilaku Nelayan Suku Bajo dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove secara Lestari di Bungku Selatan Kabupaten Morowali

Bajonesse Fisher's Behaviour in Utilizing Sustainable the Mangrove Forest in Bungku Selatan, Morowali District

Siti Aisa Lamane[1,*)], Anna Fatchiya[2)], Arif Satria[2)]

[1]Program Studi Ilmu Penyuluhan Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palopo, Kota Palopo 91959, Indonesia
[2]Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
[*)]*E-mail Korespondensi: sitiaisa@umpalopo.ac.id*

Diterima: 23 Maret 2020 Direvisi: 8 April 2020 Disetujui: 27 Juli 2020 Publikasi Online: 1 September 2020

ABSTRACT

This study aim to analyse (1) the behaviour of Bajonesse Fisher's in making use of mangrove forest and (2) factors that influence the Bajonesse Fisher's in utilizing the mangrove forest. This research used survey with individual analysis and conducted in Bungku Selatan District. The number of sample is 89 Bajonesse Fisher's. The data is analysed by using descriptive statistic and correlational. The result of the study indicated that the behaviour of Bajonesse Fisher's in utilizing of mangrove forest can be categorized fairly good as they put the sustainability aspect as priority as has been thought by their forefather for generations. Internal characteristics included ages and family size, contributed positive significantly correlated with to their behaviours of knowledge, attitudes, and actions. Socio-cultural environment included figures of adoption of costumary norms gived positive impact to their behaviour. Ecological condition of mangrove forest is moderate.

Keywords: *Bajonesse Fisher's, Behaviour, Conservation, Sustainable.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk (1) menganalisis perilaku Nelayan Suku Bajo (pengetahuan, sikap, tindakan) dalam dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari (2) faktor-faktor yang mempengaruhi nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari (3) kondisi ekologis hutan mangrove di Bungku Selatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan unit analisis yaitu individu dan dilaksanakan di Bungku Selatan. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 89 orang dan merupakan nelayan Suku Bajo. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku Nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan dan pelestraian hutan mangrove di Bungku Selatan termasuk dalam kategori cukup baik dengan mengedepankan aspek kelestarian yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka. Karakteristik internal meliputi umur dan jumlah tanggungan keluarga berhubungan positif tindakan Nelayan Suku Bajo sedangkan jumlah pendapatan berhubungan negatif dengan sikap dan tindakan. Lingkungan sosial budaya yaitu penerapan norma adat berhubungan positif terhadap tindakan. Kondisi ekologis hutan mangrove tergolong sedang.

Kata Kunci: Lestari, Mangrove, Nelayan Suku Bajo, Perilaku.

Content from this work may be used under the terms of theCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia.
E-ISSN : 2442-4110 | P-ISSN : 1858-2664

PENDAHULUAN

Luas hutan mangrove di Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 40,4% pada Tahun 2010, dari luas total 29.621,56 hektar pada Tahun 1988. Kecenderungan penurunan luas hutan menimbulkan kerusakan ekosistem ekosistem mangrove. Kerusakan hutan mangrove ini banyak disebabkan oleh peningkatan penggunaan lahan pantai serta pengelolaan ekosistem mangrove yang belum memperhatikan aspek kelestariannya seperti kegiatan perubahan fungsi areal hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman dan penebangan kayu yang dilakukan baik oleh penduduk setempat maupun oleh penduduk diluar desa (Ditjen RLPS, Dephut 2006). Fenomena kerusakan hutan mangrove ini apabila terus berlanjut dan tidak segera ditangani maka akan berakibat sangat buruk bagi ekologi hutan mangrove tersebut. Kajian (Kordi K, 2012) menunjukan bahwa kerusakan hutan mangrove berdampak pada terjadinya abrasi pantai yang semakin kritis, intrusi air laut lebih jauh ke daratan, potensi perikanan menurun, kehidupan satwa liar dan berbagai jenis habitat lainnya terganggu serta sumber pendapatan masyarakat sekitar berkurang.

Salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang memiliki hutan mangrove adalah Kecamatan Bungku Selatan. Hutan mangrove banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara langsung, mengambil ranting mangrove untuk keperluan kayu bakar dan batang yang berukuran besar untuk peralatan rumah tangga maupun secara tidak langsung, untuk kegiatan memancing, mengambil kerang, membuat perangkap ikan dan menjadi penahan ombak. Pemanfaatan ini erat kaitannya dengan nelayan Suku Bajo yang saat ini telah menetap di wilayah ini. Suku Bajo mayoritas bekerja sebagai nelayan secara turun temurun (Hamzah, 2019). Oleh karena kehidupan Suku Bajo sangat dekat dengan laut, bagi mereka nelayan dan laut dapat dipandang sebagai budaya, sumber mencari nafkah atau sarana pelestarian lingkungan laut dan pesisir. Menurut (Zacot, 2008)dahulu mereka hidup di atas perahu dan berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Menurut (Salman et al., 2011) Suku Bajo memiliki perilaku khas dan beberapa masalah dalam kehidupan sosialnya seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pola kehidupan yang hanya bergantung pada laut, tertinggal dalam pembangunan dan mental, serta eksploitasi hasil laut.

Dinamika kehidupan yang sangat sulit dipisahkan dengan laut, membuat kajian tentang Suku Bajo termasuk dari sisi kehidupan sosial menjadi menarik. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Bungku Selatan, banyak ditemui Suku Bajo yang hidup di sekitar hutan mangrove. Semua desa yang memiliki hutan mangrove di huni oleh sebagian besar nelayan Suku Bajo dan kondisi setiap hutan mangrove tersebut beberapa mengalami kerusakan parah. Sehingga bisa diduga hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat tersebut seperti menjadikan kayu mangrove sebagai kebutuhan sehari-hari. Nelayan Suku Bajo yang memiliki kesadaran akan pentingnya hutan mangrove yang lestari merupakan bagian dari perilaku masyarakat yang positif. Kesadaran yang sudah dimiliki ini akan disertai dengan upaya mencari informasi yang dapat memberikan pengetahuan yang benar tentang bagaiman memanfaatkan dan melestarikan hutan mangrove. Kesadaran diri untuk mengetahui dan mencari informasi tentang pemanfaatan hutan mangrove secara berkesinambungan akan mengarah pada terbangunnya sikap masyarakat yang positif terhadap usaha memanfaatkan hutan mangrove dengan bijak sesuai dengan fungsinya.

Sehingga kondisi ekologis hutan mangrove tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang hidup di sekitar hutan mangrove dan memanfaatkan hutan mangrove. Kesadaran akan pentingnya hutan mangrove dan perilaku positif masyarakat dalam beriteraksi dengan hutan mangrove bisa menentukan apakah hutan mangrove akan lestari atau tidak. Oleh karena itu, interaksi antara nelayan Suku Bajo dengan hutan mangrove merupakan hubungan yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perilaku nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari di Kecamatan Bungku Selatan, (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari di Kecamatan Bungku Selatan dan (3) Bagaima kondisi ekologis hutan mangrove di Kecamatan Bungku Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis perilaku nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari di Bungku Selatan Kabupaten Morowali (2) menganalisis factor-faktor yang berhubungan perilaku nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan hutan mangrove secara lestari di Kecamatan Bungku Selatan (3) Menganalisis kondisi ekologis hutan mangrove di Kecamatan Bungku Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2017 di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan menggunakan metode survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling* didasarkan pada: (1) desa tersebut menjadi prioritas dalam pengelolaan ekosistem Hutan Mangrove oleh pemerintah daerah (2) belum pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya. (3) desa tersebut merupakan tempat ekosistem hutan mangrove yang mempunyai banyak keanekaragaman ekosistem. (4) desa tersebut memiliki cirri khas yakni desa pertama masyarakat Suku Bajo hidup berdampingan dengan Suku Buton dan mampu mempengaruhi dari segi bahasa dan gaya hidup, desa kkedua merupakan mayoritas Suku Bajo dan desa ketiga masyarakat Suku Bajo hidup berdampingan dengan Suku Bungku dan telah dipengaruhi oleh Suku Bungku dari segi penggunaan bahasa. Jumlah populasi penelitian yaitu 295 orang KK bermukim di Desa Umbele Lama, Desa Pulau Bapa dan Desa Poo. Penentuan sample menggunakan konsep (Neuman, 2000), yakni jika populasi tergolong kategori kecil, yaitu kurang dari 1000 populasi, maka sampel minimal 30% dari jumlah populasi sehingga diperoleh 89 orang. Penentuan sampel pada setiap Desa menggunakan teknik *proportional stratified random sampling* berdasarkan tingkat sosial ekonomi melalui informasi dari sekertaris desa agar bisa mewakili populasi dengan pertimbangan lain agar data tidak bias. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari data desa. Data-data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis menggunakan uji analisis statistik deskriptif dan analisis bivariat pearson korelasional menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 23. Data kualitatif digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data kuantitatif.

Hasil analisis uji instrumentasi didapat seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid. Hal ini terlihat dari nilai r hitung yang berkisar dari 0,788 sampai dengan 0,848 nilai ini lebih besar daripada nilai r tabel yaitu 0,404 pada taraf nyata lima persen. Hasil uji coba instrumen juga menunjukkan bahwa nilai koefsien reliabilitas alpha cronbach pada seluruh variabel (karakteristik individu, lingkungan sosial budaya, perilaku Nelayan Suku Bajo dan keberlanjutan manfaat hutan mangrove) termasuk kategori reliabel dengan kisaran nilai koefsien reliabilitas alpha cronbach yaitu 0,801 sampai dengan 0,831.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik internal

Karakteristik individu nelayan memperlihatkan secara umum umur nelayan berada dalam usia dewasa awal, tingkat pendidikan rendah, jumlah pendapatan terkategori tinggi, jumlah tanggungan keluarga berada dalam kategori sedang dan kepemilikan alat tangkap didominasi oleh peralatan tradisional seperti yang tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1 Persentase individu berdasarkan karakteristik internal nelayan Suku Bajo

Peubah	Kategori	Umbele Lama (n: 47)	Pulau Bapa (n:21)	Poo (n: 21)
Umur (tahun)	Muda (20-30)	19.0	14.3	14.3
	Dewasa (31-50)	60.0	38.1	33.3
	Usia (>50)	21.0	47.6	52.4
Tingkat pendidikan (tahun)	Rendah (1-6)	68.0	76,2	66.7
	Sedang (7-9)	28.0	14,3	28.6
	Tinggi (>12)	4.00	9,5	4.80

Peubah	Kategori	Umbele Lama (n: 47)	Pulau Bapa (n:21)	Poo (n: 21)
Jumlah pendapatan (juta/bulan)	Rendah (1-10)	40.0	38.1	81.0
	Sedang (11-30)	38.0	38.1	9.50
	Tinggi (31- 100)	21.0	23.8	9.50
Jumlah tanggungan keluarga (orang)	Kecil	40.0	57.1	47.6
	Sedang	47.0	38.1	47.6
	Besar	13.0	4.80	4.80
Kepemilikan alat tangkap (orang)	Tradisional	63.0	38.0	38.0
	Semi modern	29.0	24.0	24.0
	modern	85.0	38.0	38.0

Umur nelayan didominasi oleh dewasa awal. Pada umur tersebut secara fisik nelayan memiliki potensi atau kemampuan untuk bekerja melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluraganya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pakpahan et al., 2006)bila dipandang dari usia dewasa awal, maka usia nelayan dapat dikatakan bahwa usia produktif, berarti nelayan memiliki kemampuan fisik yang baik. Di lokasi penelitian juga ditemui nelayan yang berusia lanjut tetap melakukan penangkapan ikan karena tuntutan hidup untuk membiayai anak dan istri dan kebiasaan hidup masyarakat Suku Bajo yang tidak bisa hanya berdiam diri di dalam rumah meskipun telah menginjak usia lanjut. Sedangkan usia muda yang menjadi nelayan lebih disebabkan mereka menggantikan kepala keluarga untuk mencari nafkah dan kebiasaan menikah muda bagi komunitas Suku Bajo.

Tingkat pendidikan nelayan tergolong rendah, umumnya bersekolah hanya sampai lulus tingkat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya jarak yang cukup jauh dari sekolah, harus mengganti peran kepala keluarga, menikah muda dan rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Mereka beranggapan bahwa tanpa sekolah yang tinggi, dengan kondisi hasil laut yang melimpah akan dapat meningkatkan taraf hidupnya kelak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pramono, 2005)mengatakan bahwa Suku Bajo beranggapan, adalah lebih penting memberikan pelajaran menangkap ikan kepada anakanak mereka daripada menyekolahkannya. Itulah sebabnya banyak anak-anak Suku Bajo yang tidak atau putus sekolah sebab mereka diharuskan oleh orangtuanya kembali segera menangkap ikan di laut lalu menjualnya demi pemenuhan kebutuhan hidup sanak keluarganya. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mengindikasikan bahwa perlunya memotivasi masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di kota.

Data penelitian menunjukan pendapatan nelayan tergolong rendah, meskipun rataan tinggi yaitu Rp. 11.522.999/bulan. Jika pendapatan keluarga dibagi dengan jumlah anggota keluarga (besar keluarga) maka pendapatan per kapita yang diperoleh sejumlah Rp 2.880.750, apabila dibandingkan dengan standar pendapatan perkapita menurut (world bank, 2016) untuk negara berkembang sebesar $ 1.006 yang jika dikonversi kedalam rupiah adalah Rp 13.543.778/tahun kemudian pendapatan ini dibagi 12 bulan menghasilkan Rp 1.128.648/bulan, maka dapat disimpulkan (2.880.750>1.110.47), pendapatan perkapita di Kecamatan Bungku Selatan lebih tinggi dari standar World Bank. Hal yang sama juga didapatkan oleh (Dahen, 2016) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dimana pendapatan nelayan payang setiap satu kali melaut paling banyak adalah Rp.540.000-Rp.2.856.666 yaitu (94,8%) responden dan paling sedikit adalah Rp.2.856.667-Rp.5.173.333 yaitu (5,2%) responden dengan rata-rata pendapatan Rp.1.97-.782 pendapatan tertinggi Rp.3.400.000 dan terendah Rp.540.000. pendapatan ini juga terkategori tinggi. Nelayan pada umumnya memiliki pendapatan yang tinggi, hanya saja kurangnya kemampuan memanajemen keuangan keluarga sehingga terkesan nelayan identik dengan kemiskinan. Pendapatan nelayan yang juga lebih tinggi dari standar World Bank dikemukakan oleh (Rahim, 2017) dalam penelitiannya pada nelayan di tiga wilayah pesisir pantai sulawesi selatan yakni: wilayah barat (Kelurahan Sumpang Binangae dan Mangempang) Kabupaten Barru, kemudian wilayah pesisir pantai selatan (Kelurahan Pabiringa) Kabupaten Jeneponto, serta pesisir timur (Kelurahan Lappa) Kabupaten Sinjai. Pendapatan usaha tangkap nelayan perahu motor sebesar Rp 552.000/trip atau Rp 42 juta/tahun dan nelayan perahu tanpa motor Rp 193.000/ trip (Rp 16 juta/tahun).

Kepemilikan alat tangkap nelayan termasuk dalam kategori tradisional. Alat tradisional banyak digunakan oleh nelayan yang pendapatannya lebih rendah. nelayan menyatakan bahwa penggunaan alat tangkap yang modren sulit diterapkan karena tidak mengerti cara penggunaannya, sudah terbiasa dengan alat tangkap tradisional yang turun temurun dari orang tua mereka, harganya yang cukup mahal dan penggunaan alat tangkap ini tergolong ramah lingkungan karena tidak akan merusak ekosistem hutan mangrove. Sebelumnya dalam menangkap ikan, banyak nelayan menggunakan cara tidak ramah lingkungan, seperti bom, potasium, dan alat selam berbahaya bagi nyawa mereka: kompresor, namun saat ini cara-cara tersebut tidak lagi digunakan karena alasan keselamatan. Penggunaan alat semitradisional dan modern hanya dilakukan oleh nelayan pemilik modal dan memiliki usaha besar yang melibatkan banyak kariawan, pemilik modal ini didominasi oleh para pemancing ikan tuna dan pemilik bagang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wianti *et al*., 2018) di Suku Bajo Mantingola. Jenis alat tangkap yang dominan bagi orang Bajo Mantigola untuk mengeksploitasi sumberdaya adalah pancing ikan dasar, panah, dan jaring yang tergolong kedalam jenis alat tangkap tradisional. Sebagian kecil nelayan Bajo Mantigola yang bermodal menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk menangkap ikan-ikan jenis pelagic besar.

Lingkungan Sosial dan Budaya

Dukungan lingkungan sosial dan budaya dengan sumberdaya alam yangmelimpah, seharusnya diikuti oleh peningkatan sumberdaya manusianya agardalam sistem pengelolaannya terjadi keseimbangan antara lingkungan denganmanusia yang ada disekitarnya. Selain itu dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah juga mempengaruhi cara masyarakat berperilaku terhadap pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Dukungan lingkungan sosial dan budaya dalam penelitian ini meliputi peran tokoh adat, penerapan norma adat, peran kelompok tani hutan dan ketersediaan fasilitas pemerintah. Hasil penelitian seperti terlihat pada tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum peran tokoh adat dan penerapan norma adat berada dalam kategori rendah, peran kelompok tani berada dalam kategori sedang.

Tabel 2 Persentase responden berdasarkan dukungan sosial dan budaya

Peubah	Kategori	Nama Desa			Total	
		Umbele Lama (n: 47)	Pulau Bapa (n: 21)	Poo (n: 21)	N	%
Peran Tokoh adat	Tinggi	21.2	0.00	4.80	11	13.0
Rataan: 6±2,3	Sedang	48.9	33.3	42.8	39	44.0
	Rendah	29.9	66.7	52.4	39	43.0
Penerapan norma adat	Rendah	80.8	33.3	66.7	59	66.0
Rataan: 3±2,4	Sedang	0.00	0.00	28.6	6	7.00
	Tinggi	19,2	66.7	4.80	24	27.0
Peran kelompok tani hutan	Rendah	6.40	0.00	81.0	20	23.0
Rataan:6 ±2	Sedang	65.9	57.2	9.50	45	50.0
	Tinggi	27.7	42.8	9.50	24	27.0
Ketersediaan fasilitas pemerintah	Rendah	36.1	23.7	47.6	32	35,0
Nilai max: 6	Sedang	0.00	0.00	47.6	10	11,0
Nilai min: 2	Tinggi	63.9	76.3	4.80	47	54,0
Rataan: 4±1						

Peran tokoh adat dari sisi pemberian pengetahuan pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove tergolong sedang, temuan lapangan menunjukan bahwa tokoh adat belum optimal, kurang memperdulikan keberadaan hutan mangrove atau aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove, hal ini disebabkan karena keberadaan mereka tidak masuk dalam struktur pemerintahan sementara itu dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa tokoh di Desa Umbele Lama, karakter masyarakat sudah mulai berubah semenjak para tetua adat terdahulu meninggal dunia, saat ini

masyarakat cenderung menurut jika hal itu berhubungan dengan pemerintah. Hal ini berbeda dengan nelayan Suku bajo yang ada Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Kecamatan Kaledupa yang masih tetap menghormati sistem *parika*. Sistem kerjanya Parika sebagai ketua yang akan memutuskan waktu penangkapan, tempat penangkapan dan sistem pembagian hasil. Tradisi ini bernilai konservasi karena bisa member batasan pada nelayan untuk tidak melakukan eksploitasi sumber daya laut (Hasrawaty *et al.*, 2017)

Desa Pulau Bapa dan Desa Poo, memperlihatkan bahwa peran tokoh adat dalam kategori rendah, hal ini dibuktikan dengan temuan lapangan tokoh adat kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Sebagian besar tokoh adat tidak memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya hutan mangrove, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara hutan mangrove. Hal ini sesuai dengan pendapat (Anwar, 2014) bahwa tokoh masyarakat (agen perubahan cendrung berhasil melakukan perubahan pada kelompok komunitas yang mempunyai strata sosial yang lebih tinggi dan mempunyai akses lebih besar berpartisipasi sosial didalam msyarakat dibandingkan dengan strata sosial yang lebih rendah dan rendah partisipasi sosial dalam pola komunikasi yang cendrung heterogen serta cendrung berhasil melakukan perubahan melalui kelompok komunitas yang terdidik dan mempunyai pendidikan formal lebih tinggi serta mudah menerima hal baru diluar systems sosial masyarakatnya (cosmopolite) dibandingkan kelompok yang kurang terpelajar dan cendrung localite. Pendapat tersebut sangat sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Penerapan norma adat di Desa Umbele Lama paling lemah, disusul oleh Desa Poo, sedangkan Desa Pulau Bapa penerapan norma adat tinggi. Penerapan norma adat komunitas suku bajo sudah mulai ditinggalkan generasi muda, kegiatan - kegiatan budaya yang bisanya dilakukan seperti (1) upacara Sangal, yang dilakukan saat musim paceklik ikan dan spesies laut lainnya. (2) Pangindaan ma kaca dan pangindaan ma pinah yang artinya mencari dalam kaca dan mencari dengan daun pinang. Upacara ini kerap dilakukan untuk mencari jawaban atas banyak hal. (3) Palilibu adalah kebiasaan melaut dalam satu atau dua hari dan kembali ke permukiman menjual hasil tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga menggunakan perahu *soppe* yang digerakkan dayung. (4) Bapongka (*babangi)* adalah kegiatan melaut selama beberapa minggu bahkan bulanan menggunakan perahu besar berukuran kurang lebih 4×2 meter disebut *leppa* atau *sopek.* (5) pelarangan membuang ke perairan laut seperti, air cucian teripang, arang kayu atau abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe dan air perasan jeruk, dan larangan mencuci alat memasak (wajan) di perairan laut. Kegiatan budaya tersebut, nelayan Desa Poo sudah meninggalkan semuanya hal ini disebabkan kondisi desa yang tidak hanya didiami oleh Suku Bajo meliankan ada Suku Bungku dan tampilnya orang-orang Etnis Bungku dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Bajo. Sedangkan Nelayan di Desa Umbele Lama hanya melakukan upacara Palilibu hal ini disebabkan oleh tidak adanya tetua adat yang bisa memimpin upaca yang lainnya selain itu di desa ini terdiri dari dua komunitas suku yakni Suku Bajo dan Suku Buton. Lain halnya dengan Desa Pulau Bapa merupakan penduduk mayoritas Suku Bajo dan masih melakukan sasakai dan bapongka sedangkan ritual lainnya sudah ditinggalkan karena tidak adanya pemuka adat yang bisa melakukan ritual tersebut.

Peran kelompok tani hutan memiliki indikator yakni melakukan penanaman kembali pada kawasan yang rusak dan melakukan pelatihan penyelamatan hutan mangrove pada masyarakat desa masuk dalam kategori rendah, sedangkan Mengusulkan dana rehabilitasi hutan mangrove masuk dalam kategori tinggi sehingga secara kseluruhan peran kelompok tani dalam kategori sedang. Temuan dilapangn menjukan kelompok tani hutan di Desa Pulau Bapa dan Desa Poo terbentuk sejak tahun 2015. Keberadaan kelompok tani disebabkan oleh adanya bantuan pemerintah Kabupaten untuk penanaman mangrove, kelompok tani ini sebenarnya tidak banyak membantu masyarakat dalam memecahkan suatu masalah. Kelompok tani belum menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar pikiran dan informasi, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, misalnya masalah permodalan, melalui kelompok tani masyarakat yang seharusnya bisa mengajukan permohonan permintaan bantuan dana kepada pemerintah, dan melalui kelompok tani dana tersebut dapat disalurkan akan tetapi justru program diturunkan begitu saja tanpa ada survei di Masyarkat. Padahal jika kelompok-kelompok tani tersebut bisa menjalankan fungsinya maka akan muda melakukan uapya pelestarian hutan mangrove. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiakanti et al., 2016) bahwa kelompok tani di Kabonga Besar yang sebagian besar anggota kelompok tani tersebut

merupakan nelayan, sehingga giat untuk menjalankan program kerja yang bermuara pada kondisi hutan mangrove yang tidak tereksploitas.

Ketersediaan fasilitas pemerintah dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya memberi fasilitas akan tetapi selalu melakukan monitoring ke lokasi, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, selain itu kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintahsebaiknya lebih berpihak kepada masyarakat, sehingga akan berdampak pada semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengelola hutan mangrove. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang diinginkan oleh masyarakat adalah upaya nyata berupa tindakan menjaga kelestarian hutan mangrove, misalnya terpasangnya papan larangan penebangan atau dilarang merusak hutan, yang dimaksudkan sebagai peringatan tegas bagi pihak-pihak yang seenaknya sendiri memanfaatkan hutan mangrove tanpa memperhatikan aspek kelestarian. Adanya papan larangan secara tidak langsung mencerminkan suatu legalitas, bahwa pemerintah akan melakukan tindakan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran. Berikut petikan wawancara dengan bapak H (53)

> " *kami juga dek masyarakat ini kalau pemerintah yang diatas-atas itu mau turun langsung menyapa mana mungkin juga kita tidak mau ikut memperbaiki hutan bakau yang sudah rusak itu. Apalagi kalau umpamanya ada anak mahasiswa yang dikasih turun di sini KKN pasti kami senang, tapi ini cumin kasih turun uang saja, mana itu uang hanya dipake sama mereka-mereka itu terus. Kami ini dek tidak mau hanya dikasih jadi alat untuk cair dana*"

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Turisno *et al.*, 2018) ditemukan bahwa pemerintah menerapkan strategi pembinaan sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan nilai ekosistem mangrove. Strategi fasilitatif dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan usaha berkaitan dengan program rehabilitasi mangrove, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perilaku Nelayan Suku Bajo

Perilaku Nelayan Suku Bajo yang dianalisis dari aspek-aspek: pengetahuan, sikap dan tindakan Nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Perilaku masyarakat nelayan sangat bergantung pada pengetahuan dan sikap yang selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan yang dilakukan dalam perbuatan nyata. Rusaknya keanekaragaman hayati sebagain besar disebabkan oleh perilaku manusia, dengan demikian perilaku manusia harus diperbaiki dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan sikap akan berubah menjadi suatu tindakan dalam bentuk perbuatan nyata untuk memperbaiki hidup (St. John F *et al.*, 2010). Pengetahuan responden mencakup tentang pemanfaatan dan pelestarian serta berbagai manfaat hutan mangrove.

Secara umum indikator-indikator pengetahuan nelayan terlihat dalam Tabel 3 bahwa pengetahuan tentang manfaat mangrove sebagi bahan baku pupuk, dan kertas, paru-paru dunia, penyubur padang lamun, buahnya bisa diolah menjadi makanan dan sebagai pencegah pengkikisan daratan menjadi pengetahuan yang banyak tidak dimiliki oleh responden.

Tabel 3 Persentase responden berdasarkan perilaku nelayan Suku Bajo

Peubah	Kategori	Umbele Lama (n: 47)	Pulau Bapa (n: 21)	Poo (n: 21)
Pengetahuan (skor)	Kurang (1-5)	23.4	4.80	28.7
	Cukup (6-10)	56.9	66.7	38.0
	Baik (11-15)	10.6	28.6	33.3
Sikap (skor)	Kurang (8-16)	6.30	23.9	19.0
	Cukup (17-23)	38.4	19.1	33.3
	Baik (24-32)	55.4	59.0	47.7
Tindakan (skor)	Kurang (1-6)	4.20	000	000
	Cukup (7-12)	95.8	100	100
	Baik (13-18)	0.00	000	000

Temuan dilapangan melalui wawancara mendalam dengan beberapa responden menunjukan bahwa selama belum pernah ada penyuluhan baik dari dinas terkait maupun LSM karena kondisi daerah yang

terpencil dan jauh dari Ibukota Kabupaten. Padahal temuan (Zainudin et al., 2015) dalam penelitiannya menunjukan semakin tinggi frekuensi kunjungan penyuluh dan materi yang disampaikan oleh penyuluh sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan hutan msngrove. Manfaat mangrove lainnya seperti membuat perikanan subur dan tempat hidup ikan, udang, kepiting, kerang, siput sudah banyak diketahui oleh responden melalui pengalamn hidup secara turun temurun dari orang tua mereka. Pengetahuan tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan seperti pelibatan masyarakat, Reklamasi pantai, penerapan sistem tebang–tanam, sistem tebang pilih, bahaya pemakaian bahan peledak dan bahan kimia pentingnya penyuluhan dan pemberian sanksi tegas diperoleh dari kesadaran sendiri karena melihat kondisi hasil tangkapan yang semakin berkurang serta kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi.

Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek baik perasaan mendukung atau perasaan tidak mendukung pada objek tersebut. Sikap Nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove memiliki indikator yang terdiri dari: pohon mangrove tidak bisa ditebang terus menerus, bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, kawasan hutan mangrove tidak diubah menjadi pemukiman, tidak baik membuang sampah di laut, ikut melakukan pembibitan mangrove, menegur bila melihat ada yang menebang kayu hutan, gotong royong dalam rehabilitasi hutan mangrove dan pemeliharaan mangrove harus melibatkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki responden dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat sebanyak 48 orang responden dengan persentase 53,9 % berpersepsi positif. Hal ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan bahwa responden memiliki sikap positif terhadap keberadaan, cara pemanfaatan, pelestarian dan manfaat hutan mangrove, walaupun belum seluruh sikap yang terbentuk terwujud dalam tindakan nyata oleh responden.

Sikap positif responden terlihat dari ketaatan responden terhadap peraturan tidak diperbolehknnya mengambil kayu dan hewan lain disekitar hutan mangrove oleh pemerintah desa. (Azwar, 2003) mengatakan bahwa sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh langsung tersebut lebih berupa predisposisi perilaku yang akan direalisasikan apabila kondisi dan situasi memungkinkan. Sedangkan, tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan oleh responden dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh responden tergolong cukup, dapat dilihat sebanyak 97,8% responden melakukan tindakan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove dalam kategori sudah cukup. Tindakan nelayan suku bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove memiliki indikator: keterlibatan penanaman bibit mangrove, ikut melakukan pemangkasan Hutan, tidak buang sampah dilaut, tidak melakukan penebangan hutan mangrove dan spot memancing berpindah-pindah.

Di ketiga Desa telah memiliki kesadaran arti pentingnya kelestarian hutan mangrove sehingga perlu dikelola dengan baik meskipun belum teraktualisasi dalam tindakan nyata yang meliputi pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan, mereka beranggapan bahwa seharusnya pemerintah menjadi penggerak dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan hutan mangrove, jika gerakan ini sudah berhasil masyarakat akan melakukan penanaman di lahan masing-masing baik secara perorangan maupun kelompok - kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa responden melakukan perbuatan nyata dalam bentuk tindakan dengan menjaga hutan mangrove agar tidak mengalami kerusakan lagi seperti dahulu, responden melakukan pencegahan dan tidak melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap terlarang. Responden mulai menyadari arti pentingnya perairan bagi kehidupan mereka, diikuti dengan bukti perbuatan nyata sebagian besar nelayan tidak merusak lingkungan perairan dan ekosistem perairan dengan menggunakan alat tangkap terlarang seperti bahan peledak dan bahan kimia lainnya.

Kondisi Ekologis Hutan Mangrove

Pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove perlu memperhatikan aspek kelestariannya, karena hutan mangrove merupakan sebagai penyanggah kehidupan bagi mahluk hidup yang berada didalamnya atau disekitarnya termasuk manusia. Kondisi ekologis hutan mangrove dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu tidak baik, sedang dan baik seperti terdapat dalam tabel empat. Sedangkan indikator mengenai kondisi eklogi hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4 Kondisi Ekologis Hutan Mangrove

Kategori	Umbele Lama (n: 47)	Pulau Bapa (n: 21)	Poo (n: 21)
Tidak baik (3-4)	91.0	95.0	97.0
Sedang (5-6)	6.40	5.00	3.00
Baik (7-8)	0.00	0.00	0.00

Berdasarkan observasi, keberadaaan hutan mangrove di Desa Umbele Lama masih terjaga. Menurut para nelayan keberadaan hutan mangrove tersebut mampu memberikan manfaat untuk produksi perikanan dan kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar dan perabot rumah. nelayan menuturkan meskipun selalu mengambil kayu namun tidak terjadi kerusakan karena masyarakat biasanya mengambil kayu dengan sistem tebang pilih dan dilakukan lebih banyk oleh para istri nelayan. Manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Umbele Lama adalah terjalinnya silaturahim antara istri nelayan ketika mereka bersama-sama mengambil kayu bakar di hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove di Desa Umbele Lama, belum dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat, meskipun hasil hutan mangrove berupa kayu mangrove dapat dijual, penangkapan ikan dan kerang-kerangan dari kawasan hutan mangrove memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat, tetap saja kondisi kehidupan masyarakat masih tetap terlilit utang, faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah para istri tidak dapat memanjamen keuangan keluarga dan perilaku boros yang sudah turun temurun. Peneltian yang sama juga dilakukan oleh (Widiastuti et al., 2016) pada masyarakat pesisir kabupaten merauke yang masih menjaga ekosistem hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukan bahwa mangrove memiliki nilai guna langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar hutan mangrove. Nilai ini antara lain berupa pemanfaatan kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar, udang, kepiting, kerang/siput dan ikan dari berbagai jenis.

Keberadaaan hutan mangrove di Desa Pulau Bapa termasuk dalam kategori sedang dimana sebagian besar (91.4%) responden menyatakan bahwa tingkat keberlanjutan manfaat hutan mangrove berada dalam kategori sedang. luasan hutan mangrove semakin berkurang akibat dialihfungsikan menjadi pemukiman. Desa ini pada awalnya adalah kawasan hutan mangrove, seiring berkembangnya penduduk dan ditemukannya sumber air dikawasan yang hutan mangrove sehingga masyarakat berbondong-bondong pindah pemukimansejak beberapa tahun lalu. Berkurangnya luasan hutan mangrove mengakibatkan hilangnya fungsi ekologi hutan mangrove sebagai penahan ombak dan angin kencang, kemudian manfaat sosial dan ekonomi pun berkurang, karena ikan kepiting, kerang-kerangan yang biasanya berada di bawah tegakan mangrove sudah mulai jarang ditemukan karena kurangnya sumber pakan dan hilangnya tempat pemijahan mahluk hidup yang tinggal didalamnya sehingga pendapatan masyarakat sekitar berkurang. Saat ini sudah mulai ada upaya dari masyarakat untuk menjaga keberlanjutan manfaat hutan mangrove dengan tidak mengambil kayu mangrove dan menjaganya dari oknum yang selama ikut merusak hutan mangrove.

Desa ini bukanlah satu-satunya yang mengalami kerusakan mangrove yang berimbas pada hilangnya fungsi ekologi dan ekonomi serta social hutan mangrove, Areal mangrove di wilayah Pamurbaya sebagian besar pernah diubah menjadi kawasan pengembangan perumahan/real estate dan budidaya perikanan payau di pesisir Surabaya Timur serta pengembangan kawasan industri dan kawasan pergudangan untuk Surabaya Utara (Mutaqin & Rohani, 2009). Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pesisir sehingga ekosistem menjadi terganggu lebih dari 50% kawasan menjadi tidak berfungsi optimal. Ditambah dengan persepsi masyarakat yang tidak menganggap ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga upaya konservasi menjadi tidak dilakukan. Kondisi akan rusaknya ekosistem mangrove ini semakin dibuktikan bahwa jenis mangrove yang ditemukan umumnya jenis Api-api yang memiliki ekosistem dekat dengan laut. Data terbaru penelitian yang dilakukan oleh (Syamsu et al., 2018)Kecamatan Gunung Anyar, merupakan kecamatan di wilayah Pamurbaya yang mengalami penurunan luas mangrove terbesar dengan nilai berturut-turut sebesar 120 ha (52%) merupakan dampak dari adanya pembangunan perumahan dan apartemen yang dilakukan oleh pengembang.

Hutan mangrove di Desa Poo tergolong dalam kategori sedang dimana sebagian besar (95.3%) responden menyatakan bahwa kondisi ekologis hutan mangrove berada dalam kategori rendah (Tabel 4), seperti halnya di Desa Pulau Bapa, Desa Poo merupakan Desa yang sebelumnya ditutupi oleh hutan mangrove. Menurut salah satu tokoh masyarakat, dahulu seluruh Desa dipenuhi hutan hanya ada

intruksi dari Pemerintah Daerah untuk memangkas semua tanaman mangrove agar Desa bisa terlihat dari luar. Sejak dahulu masyarakat tidak perna melakukan penebangan liar, justru yang banyak merusak dari Desa lain. Hutan mangrove di Desa Poo memiliki keunikan tersendiri yaitu ada kubangan panjang yang mirip sungai dan kubangan tersebut menjadi tempat tinggal berbagai spesies ikan sehingga jika ada kegiatan bersama maka ikan-ikan tersebut akan dijaring lalu akan dibiarkan selama setahun kembali diisi oleh ikan yang baru. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muryani et al., 2011) ditemukan bahwa pemanfaatan kayu mangrove justru dilakukan masyarakat setempat sehingga tidak adalagi tersisah vegetasi mangrove yang diameternya diatas 10 cm. penebangan kayu mangrove karena adanya peluang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku arang, untuk dijual gelondongan diluar desa dan kayu bakar untuk energi rumah tangga. Berikut tabel kondisi ekologis hutan mangrove secara umum.

Tabel 5 Indikator kondisi eklogis hutan mangrove

Indikator kondisi ekologis	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rasa air yang digunakan sehari-hari		
a. Semakin tawar	47	53
b. Tetap	-	-
c. Menjadi asin	42	47
Perubahan luasan hutan mangrove		
a. Semakin luas	-	-
b. Tetap	47	53
c. Semakin sempit	42	47
Ketersediaan bibit mangrove		
a. Iya	47	53
b. belum	42	47
Mengurangi jumlah pengangguran		
a. Semakin Banyak	-	-
b. Semakin Sedikit	-	-
c. Tidak ada	89	100
Banyak kegiatan kegiatan penelitian		
a. Sering	-	-
b. Jarang	-	-
c. Tidak pernah	89	100
Ukuran hasil tangkapan		
a. Semakin besar-besar	-	
b. Tetap	9	10
c. Semakin kecil-kecil	80	90
Kondisi hasil tangkapan ikan		
a. Semakin banyak	-	
b. Tetap	8	11
c. Semakin sedikit	81	91

Hubungan Karakteristik Internal dengan Perilaku Nelayan Suku Bajo

Karakteristik individu dibangun berdasarkan unsur-unsur demografis, perilaku, psikografis dan geografis. Melalui karakteristiknya, nelayan Suku Bajo dapat diketahui perilakunya dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Hasil penelitian (Suparta, 2003) bahwa faktor internal individu seperi: umur, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, dan pengalaman berpengaruh terhadap tindakannya dalam berusaha. Untuk mengetahui hubungan variabel karakteristik individu dengan variabel perilaku Nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan dan pelestraian hutan mangrove dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Hubungan karakteristik individu dengan perilaku nelayan Suku Bajo

Variabel	Nilai korelasi		
	Pengetahuan	Sikap	Tindakan
Umur	-0.090	0.014	0.238*
Tingkat pendidikan	0.176	0.077	-0.097
Jumlah pendapatan	0.016	-0.302**	-0.259*
Tanggungan keluarga	-0.176	-0.013	0.243*

**. Berkorelasi pada level 0.01 (2-arah).
*. Berkorelasi pada level 0.05 (2-arah).

Umur nelayan tidak berkorelasi terhadap pengetahuan dan sikap nelayan Suku Bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove, hal ini berarti bahwa umur nelayan memiliki hubungan yang lemah terhadap pengetahuan dan sikap nelayan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti *et al*., 2015) yang menunjukkan bahwa umur responden tidak berkorelasi dengan pengetahuan dan sikap dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan objek lelang lebak lebung di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini memberikan indikasi tidak terdapat kecenderungan bahwa semakin tua umur responden semakin baik pengetahuan dan sikapnya terhadap rehabilitasi mangrove. Umur nelayan berkorelasi nyata dengan tindakan, artinya bahwa umur memiliki hubungan yang kuat terhadap tindakan nelayan, dengan semakin tua umur nelayan maka akan semakin positif tindakan yang dilakukan nelayan dalam dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove serta semakin positif tindakan nelayan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove.

Tingkat pendidikan tidak berkorelasi dengan pengetahuan, sikap dan tindakan nelayan suku bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove, hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap pengetahuan nelayan. Semakin tinggi tingkat pendidikan nelayan maka tidak menjamin semakin positif perilaku nelayan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Pinto, 2015) di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY bahwa pendidikan yang rendah yakni tingkat Sekolah Dasar menyebabkan perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi kurang. Jumlah Pendapatan nelayan tidak berkorelasi terhadap pengetahuan nelayan suku bajo, hal ini berarti bahwa jumlah pendapatan memiliki hubungan yang lemah terhadap pengetahuan, sesuai dengan penyataan (Hartati *et al.*, 2005) pendapatan tidak berhubungan dengan tingkat pengetahuan responden, tidak terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan responden akan semakin baik pula tingkat pengetahuan responden. Pendapatan berhubungan negatif dengan sikap dan tindakan nelayan, ini berarti nelayan yang memiliki pendapatan rendah memiliki kecenderungan sikap dan tindakan yang positif. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang rendah, maka tidak akan cukup mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga nelayan akan cenderung menjaga lingkungan yang diwujudkan dengan sikap dan tindakan yang positif. Sedangkan seseorang yang mempunyai pendapatan yang banyak maka ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan mempengaruhi perilaku kepala keluarga dalam memanfaatkan semua sumber yang menghasilkan uang tanpa menghiraukan kondisi lingkungan.

Tanggungan keluarga nelayan tidak berkorelasi dengan pengetahuan dan sikap namun berkorelasi nyata dengan tindakan nelayan Suku Bajo, hal ini dapat diartikan bahwa jumlah tanggungan keluarga nelayan memiliki hubungan yang kuat dengan tindakan nelayan. Semakin besar jumlah tanggungan nelayan maka akan semakin positif tindakan dan usaha nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kepala keluarga tidak begitu memperhatikan masalah pengetahuan dalam memamnfaatkan dn melestarikan wilayah pesisir, mereka hanya mengikuti pengetahuan turun temurun. Penelitian ini memilki kesamaan dengan penelitian (Yanti *et al.*, 2015) menemukan bahwa besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi pola kehidupan (tindakan) yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya. Semakin besar jumlah tanggungan nelayan yang masih dalam usia belum produktif (usia sekolah) maka akan semakin positif tindakan dan usaha nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepemilikan alat tangkap tidak berkorelasi dengan pengetahuan, sikap dan tindakan nelayan suku bajo dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan, hal ini dapat diartikan bahwa kepemilikan alat tangkap memiliki hubungan yang lemah terhadap tindakan nelayan. Banyak alat tangkap yang digunakan salah satunya penggunaan media seperti bubu sangat

mengganggu rantai alami ekosistem perairan laut, namun menurut para nelayan bubu tidak merusak karena tidak menggunakan batu karang untuk menimbun melainkan menggunakan batu darat karena batu karang membuat ikan tidak mau mendekat.

Hubungan Lingkungan Sosial dan Budaya dengan Perilaku Nelayan

Suku Bajo memiliki nilai-nilai lokal sendiri yang dikenal dengan budaya bahari, yang telah mempengaruhi pola kehidupan mereka. Budaya bahari dipahami sebagai ciri khas sebuah komunitas masyarakat pesisir yang didominasi oleh para nelayan. Pada Tabel 7 terlihat bahwa Nelayan Suku Bajo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kepala adat, namun dari hasil penelitian di Desa Umbele Lama dan Desa Pulau Bapa sudah lama kepala adat meninggal dunia dan sampai saat ini tidak memiliki pengganti namun masih ada sebagian nelayan masih mengikuti anjuran yang perna diberikan oleh kepala adat. Perannya memang tidak akan signifikan karena kondisinya tidak sama lagi seperti dahulu ketika masih ada kepala adat.

Tabel 7 Hubungan lingkungan sosial budaya dengan perilaku nelayan

Variabel	Nilai Korelasi		
	Pengetahuan	Sikap	Tindakan
Peran Tokoh Adat	0.152	0.003	0.105
Penerapan Norma Adat	0.148	-0.183	0.276**
Peran Kelompok Tani	-0.088	-0.001	0.042

**. Berkorelasi pada level 0.01 (2-arah).
*. Berkorelasi pada level 0.05 (2-arah).

Hasil wawancara mendalam ditemukan bahwa ada beberapa tokoh yang masih disegani hanya saja masyarakat menginginkan agar lembaga adat dikelola secara formal. Di Desa Poo justru terjadi sebaliknya, daesa ini merupakan pemekaran dari Desa induk yang memiliki ragam suku sehingga menurut salah sesorang sesepuh Desa tidak memungkinkan diterapkannya adat dari salah satu suku saja. Mengenai kepala adat ini, (Kristoper, 2016) menemukan dalam penelitiannya di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan bahwa Kepala Adat Desa Long Bawan memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian masalah fisik (sengketa tanah dan cara memanfaatkan

Pakpahan, H. T., Lumintang, R. W. E., & Susanto, D. (2006). Hubungan Motivasi Kerja Dengan Perilaku Nelayan Pada Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Penyuluhan*, *2*(1). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i1.2138

Pinto, Z. (2015). *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)*. *3*, 163–174. https://doi.org/10.14710/jwl.3.3.163-174

Pramono, J. (2005). *Budaya Bahari*. Gramedia.

Pribadiningtyas, D. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Mangrove (Studi Tentang Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, *1*(3), 70–79. https://media.neliti.com/media/publications/73607-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-rehabilitas.pdf

Rahim, A. (2017). Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *6*(2), 235. https://doi.org/10.15578/jsekp.v6i2.5776

Salman, D., Tahara, T., Suyuti, N., Lampe, M., & Demmalino, E. B. (2011). *Telaa Dinamika Pranata Sosial Tentang Kearifan Lokal Masyrakat Pantai Melestarikan Budaya Bahari dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jagad bahari* (1st ed.). Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.

St. John F, E., G., J., & J, J. (2010). &RQVHUYDWLRQ DQG KXPDQ EHKDYLR *psychology*. *Persky 1995*, 658–667.

Suparta, N. (2003). Penyuluhan sistem agribisnis suatu pendekatan holistik. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *2003*, 1–16. soca: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2003 - ojs.unud.ac.id

Suprayitno, A. R., Sumardjo, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2012). *Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. *8*(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v8i1.9890

Syamsu, I. F., Nugraha, A. Z., Nugraheni, C. T., & Wahwakhi, S. (2018). KAJIAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DI EKOSISTEM MANGROVE PANTAI Study of Land Cover Change in the Mangrove Ecosystem of the East Coast of Surabaya. *Media Konservasi*, *23*(2), 122–131. https://media.neliti.com/media/publications/267636-study-of-land-cover-change-in-the-mangro-70bd92e7.pdf

Turisno, B. E., Suharto, R., & Priyono, E. A. (2018). Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob Dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(4), 479. https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.479-497

Wiakanti, L., Rahman, I., & Toknok, B. (2016). Peram serta Kelompok Tani Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kawasan Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *WARTA RIMBA*, *4*, 47–53.

Wianti, N. I., Suriana, Ola, T. La, & Tadjuddah, M. (2018). *The Vulnerability of Mantigola Bajo Household In Wakatobi Marine National Park*. *6*(1). https://doi.org/10.22500/sodality.v6i1.21207

Widiastuti, M. M., Ruata, N. N., & Arifin, T. (2016). Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *11*(2), 147. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i2.3856

World Bank. (2016). *No Title*. https://www.worldbank.org/

Yanti, E. A., Satria, A., & Sugihen, B. G. (2015). *The Managing of Institutional Auction of Lebak Lebung and Fisherman Behavior in Muara Enim Regency Sumatra Selatan Province*. *11*(2), 159–175.

Zacot, R. (2008). *Orang Bajo: Suku Pengembara Laut (Pengalaman Seorang Antropolog)*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Zainudin, Sumardjo, & Susanto, D. (2015). Coastal Communities Behaviour in Managing and Conserving The Mangrove Forest in Pangkep District of South Sulawesi Province. *Jurnal Penyuluhan, 11*(1).